

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sistem pemerintahan sangat menentukan bagaimana suatu negara dijalankan. Sistem kerjanya tentu lebih kompleks dan semakin kompleks sistem kerja suatu negara, maka negara tersebut memerlukan suatu sistem pemerintahan yang baik dalam koordinasi maupun kerjasamanya. Secara umum, ada dua sistem pemerintahan, yaitu sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidential. Salah satu negara yang berada di Asia Selatan yaitu Pakistan yang menyelenggarakan sistem pemerintahan parlementer pada awal kemerdekaannya. "Pakistan juga merupakan negara pertama di dunia yang secara formal diakui sebagai Republik Islam. Dasar konstitusinya adalah *The Constitution Of The Islamic Republic of Pakistan* yaitu negara demokrasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang berkeadilan sosial". (Nazamuddin, 2010: 1)

Pakistan memisahkan diri dari India dan mengumumkan kemerdekaannya pada tanggal 14 Agustus 1947. Bersamaan dengan bangkitnya perjuangan rakyat India melawan penjajahan Inggris, pada tahun 1906 terbentuk partai Liga Muslim

yang diketuai Muhammad Ali Jinnah dan bertujuan untuk membentuk pemerintahan islami. Partai ini kemudian secara bertahap mampu menarik kekuatan kaum muslim dan akhirnya terbentuklah negara Pakistan. Pakistan membentuk pemerintahan militer dan berubah menjadi Republik Islam Pakistan pada tahun 1970. Dalam bukunya "*Reconciliation: Islam, Democracy and The West*", Benazir Bhutto menyebutkan "masa depan Pakistan ditentukan pertarungan kediktatoran versus demokrasi dan ekstremisme versus modernisasi". (Nazamuddin, 2010: 2)

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pakistan memiliki sistem pemerintahan yang penuh dengan kediktatoran dan ekstremis. Hal ini tentunya menimbulkan perselisihan antara kaum modernis muslim dan tradisional. Kontroversi tentang ideologi negara menjadi awal timbulnya permasalahan di negara Pakistan baik dari ideologi partainya maupun para tokohnya.

Partai Liga Muslim merupakan partai yang berperan penting dalam pembentukan negara Pakistan. Namun, partai ini banyak di tentang oleh partai Islam dikarenakan perbedaan ideologi dan persepsi dalam menyikapi ideologi pembentukan Pakistan. Banyak diantara tokoh muslim India berpendapat bahwa identitas tokoh-tokoh Partai Liga Muslim kurang mencerminkan perilaku sosial yang baik.

Dalam keluarga Benazir Bhutto, pendidikan merupakan hal yang diprioritaskan. Ayahnya memberikan contoh bahwa pendidikan adalah hal yang penting untuk Pakistan yang lebih maju. Oleh karena itu, pada umur tiga tahun, Benazir Bhutto dikirim ke sekolah persiapan anak-anak di Lady Jennings, kemudian pada usia lima tahun ia dikirim ke salah satu sekolah yang bagus di Karachi di Convent of Jesus and Mary.

Setelah selesai pendidikan dasar, Benazir Bhutto memutuskan memasuki Universitas Harvard Radcliffe, dalam bidang politik. Kemudian, Benazir Bhutto melanjutkan pendidikan ke jenjang Pasca Sarjana ke Perguruan Tinggi terbaik di dunia yaitu Oxford Union atas permintaan ayahnya. Disiplin ilmu yang dipelajari diantaranya politik, filsafat dan ekonomi. Dari pendidikannya inilah, pemikiran-pemikiran Benazir Bhutto sangat baik dan cemerlang sehingga sesuai dengan kondisi yang modern namun tidak keluar dari garis agama yang dianutnya yaitu agama Islam.

”Paradigma politik di Pakistan yang mencerminkan dominasi agama disatu sisi dan pemikiran politik dunia barat yang mencerminkan dominasi negara pada sisi lain, telah melahirkan beberapa aliran pemikiran politik Islam di sepanjang abad ke-20, yakni aliran dan faham modernisme, sekularisme dan liberalisme baik didasarkan pada agama maupun negara”. (Hamsah Hasan, 2015: 22)

Dari pernyataan di atas, dapat dilihat bahwa pemikiran-pemikiran dan praktik-praktik politik Islam tidak dapat dilepaskan dari upaya-upaya pengadaptasian pemikiran politik hubungan agama dan negara mulai dari liberalisme, sosialisme hingga demokrasi yang dihembuskan dunia barat. Demikian pula pemikiran Benazir Bhutto yang demokratis namun tidak terlepas dari agama Islam yang dianutnya.

Pada masa pemerintah Zia Ulhaq, partai-partai politik dibekukan, media massa berada dalam pengawasan ketat rezim militer dan demokrasi dianggap sebagai paham yang bertentangan dengan Islam. Namun, ketika Pakistan dipimpin oleh Benazir Bhutto yang mencoba menawarkan sistem demokrasi yang langsung disambut dengan baik oleh sebagian kalangan, walaupun ada juga kalangan yang

menolaknyanya. ”Benazir Bhutto berupaya menghapuskan ketabuan fatwa keagamaan di negaranya yang melarang perempuan menjadi pemimpin. Dan ia juga sosok perempuan yang berani untuk mengeluti dunia politik yang penuh dengan intrik dan konflik”. (Ni’matul Husna, 2010: 5)

Dari pernyataan di atas, dapat diketahui bahwa Benazir Bhutto adalah sosok perempuan yang membuktikan keberpihakannya kepada kaum perempuan yang pada rezim sebelumnya lebih banyak dirugikan akibat kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak yang berkuasa pada waktu itu. Tidak terkecuali dalam hak politik bagi kaum perempuan.

Adapun alasan penulis memilih perjuangan Benazir Bhutto terhadap hak politik perempuan adalah karena Benazir Bhutto mencoba menawarkan sistem demokrasi di Pakistan. Benazir Bhutto merupakan perempuan yang berani mengkritik penguasa yang dianggapnya otoriter, padahal tidak banyak perempuan yang mampu melakukan hal yang demikian.

Fenomena realistik inilah yang dianggap penulis masih menyimpan banyak pertanyaan, karena alasan tersebutlah penulis tertarik untuk mengambil judul :”Perjuangan Terhadap Hak Politik Perempuan Sebagai Simbol Demokrasi Benazir Bhutto di Pakistan (1979-1988)”.

Bertolak dari latar belakang yang dikemukakan di atas sehubungan dengan pemikiran Islam di Indonesia pasca orde baru, penulis menemukan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana biografi Benazir Bhutto ?
2. Bagaimana karir politik Benazir Bhutto ?

3. Bagaimana pemikiran Benazir Bhutto tentang hak politik perempuan sebagai simbol demokrasi di Pakistan ?

1.2 Alasan Pemilihan Judul

Adapun alasan mengapa penulis memilih judul tersebut adalah sebagai berikut :

1. Karena penulis ingin mengkaji lebih jauh lagi tentang kehidupan Benazir Bhutto.
2. Karena penulis ingin membahas tentang karir politik yang dijalani oleh Benazir Bhutto.
3. Karena penulis ingin mengkaji lebih jauh tentang pemikiran Benazir Bhutto tentang hak politik perempuan sebagai simbol demokrasi di Pakistan.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut

1. Untuk mengetahui biografi Benazir Bhutto.
2. Untuk mengetahui bagaimana perjalanan karir politik Benazir Bhutto.
3. Untuk mengetahui pemikiran Benazir Bhutto tentang hak politik perempuan sebagai simbol demokrasi di Pakistan.

1.4 Anggapan Dasar

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

Anggapan dasar adalah merupakan titik tolak untuk menyusun rencana penelitian sebagai tolak ukur memulai perencanaan yang dapat menjadi arah dan

batas penelitian. Adapun yang menjadi anggapan dasar oleh penulis adalah :

1. Benazir Bhutto dibesarkan dalam lingkungan keluarga Islam dan mengikuti jejak sang ayah yang seorang politikus.
2. Latar belakang pendidikan banyak mempengaruhi Benazir Bhutto dalam menjalankan karir politiknya sehingga aktif dalam gerakan-gerakan perjuangan hak perempuan.
3. Pemikiran Benazir Bhutto sebagai seorang perempuan yang sempat mengenyam pendidikan di Barat telah mendorongnya untuk memperjuangkan hak politik perempuan sebagai symbol perjuangannya di Pakistan.

1.5 Hipotesa

Hipotesa merupakan perumusan jawaban atau dugaan sementara atas perumusan masalah yang sebenarnya harus dibuktikan melalui suatu kegiatan penelitian. Adapun hipotesa dalam penelitian ini adalah :

1. Latar belakang keluarga menjadikan Benazir Bhutto berkeinginan terjun ke dunia politik dengan mengikuti jejak sang ayah sebagai seorang pemimpin di Pakistan.
2. Keberaniannya dalam mengkritik penguasa, menjadikan Benazir Bhutto memiliki banyak hambatan dan tantangan. Karir politiknya tidak berjalan mulus dan banyak pertentangan karena dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam terutama dalam hal kepemimpinan perempuan.
3. Lingkungan dan pendidikan menyebabkan lahirnya pemikiran Benazir Bhutto tentang perempuan dan hak-haknya dalam Islam termasuk hak dalam berpolitik.

1.6 Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat kritis yang bertumpu pada telaah pustaka, baik berupa buku-buku, ensiklopedi, jurnal, maupun internet. Penelitian ini merupakan penelitian sejarah dan metode yang digunakan adalah metode sejarah kritis dengan menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau berdasarkan data yang diperoleh. "Metode sejarah ini bertumpu pada empat langkah kegiatan yaitu pengumpulan data (heuristik), kritik sumber (verifikasi), penafsiran (interpretasi), dan penulisan (historiografi)" (Dudung Abdurrahman, 2007: 54)

Dalam rangka mengumpulkan sumber, penulis melaksanakan penelitian perpustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang penulis lakukan di perpustakaan yang bertujuan untuk mendapatkan data-data melalui bahan bacaan yang mempunyai kaitan atau hubungan dengan permasalahan yang penulis ajukan dalam skripsi ini, sejauh kemampuan yang ada pada penulis.

Langkah-langkah dalam penelitian sejarah meliputi empat tingkat sebagai berikut :

1. Heuristik (mencari sumber-sumber sejarah);

adalah upaya penelitian yang mendalam untuk mengumpulkan dokumen-dokumen agar dapat mengetahui segala bentuk peristiwa atau kejadian bersejarah di masa lampau. Dari informasi masyarakat tentang penemuan benda-benda bersejarah, para sejarawan bisa memperoleh berbagai informasi yang akurat dan bisa melakukan penelitian lebih lanjut. Informasi dari masa lampau tersebut disebut sumber-sumber sejarah.

2. Verifikasi (menilai sumber-sumber sejarah secara kritis);

Yaitu menilai dan meneliti sumber-sumber sejarah yang telah ditemukan menyangkut dua aspek, yaitu aspek ekstern dan aspek intern. Dalam lingkup kritik ekstrem akan diajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

- a. Apakah sumber itu memang sumber yang dikehendaki ?
- b. Apakah sumber yang diperoleh itu termasuk sumber primer atau sumber sekunder ?

3. Interpretasi (menafsirkan keterangan sumber sejarah);

Adalah menafsirkan dan menyimpulkan keterangan yang dapat dipercaya mengenai bahan-bahan yang autentik (sumber-sumber sejarah) atau berdasarkan informasi yang diberikan oleh jejak-jejak masa lampau. Kita berusaha membayangkan bagaimana peristiwa masa lampau itu terjadi.

Proses penafsiran fakta-fakta sejarah serta proses penyusunannya dapat kita masukkan, kita harus memilih mana yang relevan dan mana yang tidak. Pemilihan itu bergantung pada anggapan-anggapan kita dan hal ini ada hubungannya dengan subjektivitas sejarah.

4. Historiografi (penulisan sejarah);

Setelah mencari sumber-sumber sejarah, menilai sumber-sumber itu, dan menafsirkan informasi yang terkandung didalamnya, maka langkah selanjutnya adalah menuliskan hasil penafsiran (intepretasi) atas fakta-fakta sejarah itu menjadi suatu kisah yang selaras.

Menulis sejarah merupakan suatu kegiatan intelektual dan ini suatu cara yang utama untuk memahami sejarah. Ketika sejarawan memasuki tahap menulis, maka ia mengerahkan seluruh daya pikirannya, bukan saja keterampilan teknis penggunaan kutipan-kutipan dan catatan-catatan, tetapi

yang terutama penggunaan pikiran-pikiran kritis dan analisisnya karena ia pada akhirnya harus menghasilkan suatu sintesis dari seluruh hasil penelitiannya atau penemuannya itu dalam suatu menuliskan yang utuh yang disebut historiografi (Helius Sjamsudin, 2007: 156).

1.7 Ruang Lingkup Pembahasan

Dalam penulisan karya ilmiah sejarah, seringkali dibatasi oleh ruang lingkup penulisan, hal ini dimaksud agar tulisan yang dihasilkan tidak melebar dari tema yang ditentukan. Dalam hal ini menyangkut dengan ruang lingkup atau skope temporal dan skope tematikal. Skope temporal yaitu yang berhubungan dengan kurun waktu atau kapan peristiwa itu terjadi. Skope tematikal merupakan pembatasan agar dalam penulisan tidak keluar dari tema yang telah ditetapkan sebelumnya.

Adapun skope temporal penulisan proposal ini adalah pada tahun 1979-1988 yang merupakan masa kepemimpinan Benazir Bhutto di Pakistan. Sedangkan skope tematikal dari penulisan proposal ini meliputi perjuangan terhadap hak politik perempuan sebagai simbol demokrasi di Pakistan.

1.8 Sistematika Penulisan

Guna menghindari terjadinya tumpang tindih dalam penyusunan penelitian ini penulis merasa perlu untuk menyusun suatu sistematika pembahasan, sehingga penulisan skripsi ini yang akan dituangkan ke dalam lima bab menjadi jelas. Adapun susunannya dalam bab adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, alasan pemilihan judul, tujuan penelitian, anggapan dasar dan

hipotesa, metode penelitian, ruang lingkup pembahasan dan sistematika penulisan.

Bab II Membahas tentang biografi Benazir Bhutto yang meliputi : latar belakang keluarga, latar belakang pendidikan, latar belakang politik dan kontribusi Benazir Bhutto di Pakistan.

Bab III Membahas tentang karir politik Benazir Bhutto yang meliputi: bergabung dengan Partai Rakyat Pakistan, keterlibatan Benazir Bhutto dalam pemerintahan, Benazir Bhutto menjadi pemimpin Partai Rakyat Pakistan, dan menjabat sebagai Perdana Menteri.

Bab IV Membahas tentang pemikiran Benazir Bhutto tentang hak politik perempuan yang meliputi: kebijakan-kebijakan Benazir Bhutto selama menjadi perdana menteri, pemikiran Benazir Bhutto tentang perempuan dan Islam serta kebijakan Benazir Bhutto terhadap hak politik perempuan.

Bab V Merupakan bab penutup dimana di dalamnya terdapat kesimpulan dan saran.

